

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

2.1.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah dapat diartikan sebagai sumber pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari wilayahnya sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Mardiasmo (2000:3) Pendapatan Asli Daerah penghasilan yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh daerah itu sendiri melalui Perda untuk kepentingan rumah tangga pemerintah daerah.

Menurut Muhtarom (2016) Pendapatan Asli Daerah merujuk pada penerimaan yang dihasilkan dari berbagai sumber di dalam wilayahnya sendiri, yang dikumpulkan sesuai dengan ketentuan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Iryanie (2018) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari berbagai sumber di dalam batas wilayahnya sendiri, yang dikumpulkan sesuai dengan ketentuan peraturan daerah yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh

oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber di dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana PAD ini bertujuan untuk memberikan kewenangan dan kemandirian kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sehingga mencerminkan potensi dan kemampuan daerah dalam mendanai kebutuhan dan Pembangunan daerah.

2.1.1.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut Mardiasmo (2019:130) terdapat Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Adapun pejelasanannya sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 2022 Pajak Daerah adalah Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Siri & Ridwan (2022) Pajak daerah adalah kontribusi wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang, dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah adalah cara negara (Pemerintah) menghimpun dana dari masyarakat yang wajib membayar sesuai dengan

ketentuan undang-undang, tanpa memberikan jasa balik yang spesifik, untuk memenuhi biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Menurut Rifai & Priono (2022) Pajak daerah adalah sumber dana negara (Pemerintah) dari warga yang patuh undang-undang, tanpa imbalan tertentu, untuk biaya pemerintahan dan pembangunan daerah. Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Pajak daerah adalah kewajiban wajib yang diberikan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan balas jasa langsung, dan digunakan untuk kepentingan daerah dan kesejahteraan rakyat.

2. Retribusi Daerah

Menurut Purnomo (2018) retribusi daerah adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada daerah yang dapat dipaksakan yang mendapat prestasi kembalinya secara langsung. Menurut Undang – Undang Nomor 1 tahun 2022 Retribusi daerah adalah salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dipungut atas pelayanan atau izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang atau badan.

Berdasarkan pendapat diatas maka bisa ditarik kesimpulan bahwa Retribusi daerah adalah pungutan daerah yang dibayarkan oleh pribadi atau badan yang mendapatkan layanan atau izin tertentu dari pemerintah daerah.

3. Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencakup penerimaan daerah yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, seperti bagian keuntungan atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik

Daerah (BUMD), bagian keuntungan atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Pendapatan ini merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang dianggarkan pada pendapatan daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

4. Lain-lain PAD yang SAH

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah Sumber keuangan daerah yang tidak termasuk pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sesuai dengan pengertian, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Menurut Sonia Murti (2021) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer yang meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

2.1.2.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Kementerian Keuangan, mendefinisikan Pertumbuhan Ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu.

Pertumbuhan ekonomi adalah indikator yang digunakan untuk mengevaluasi hasil dari kinerja pemerintah daerah dalam konteks desentralisasi. Pertumbuhan ekonomi direpresentasikan oleh Laju Pertumbuhan Ekonomi, di

mana peningkatan pembangunan ekonomi di daerah akan berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut (Jannah et al., 2022).

Sukirno (2017) Mengemukakan pendapat mengenai Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan merupakan ukuran perubahan aktivitas ekonomi yang terjadi setiap tahun. Pengukurannya dengan membandingkan pendapatan nasional antara tahun-tahun yang berbeda. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Mahalizikri Fakhrudin et al. (2022) menyatakan bahwa Pertumbuhan ekonomi adalah angka yang menunjukkan kemajuan ekonomi suatu negara dalam satu tahun jika dilihat dari perbandingan dengan tahun sebelumnya.

Dalam penelitiannya Holung et al. (2021) Mempertegas bahwa Pertumbuhan Ekonomi suatu negara terjadi jika hasil nyata dari penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih tinggi daripada tahun tahun sebelumnya. Artinya Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari perbandingan antara pendapatan nasional atau kemajuan ekonomi yang dicapai oleh negara tersebut. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses atau ukuran yang menggambarkan perubahan kondisi atau aktivitas ekonomi suatu negara dari tahun ke tahun, yang dapat dilihat dari perbandingan pendapatan nasional atau kemajuan ekonomi yang dicapai. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan arah dan tujuan dari perekonomian suatu negara untuk mencapai keadaan yang lebih baik.

2.1.2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Sukirno (2010:213) dalam bukunya Makro Ekonomi menjelaskan bahwa faktor-faktor ekonomi menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Beberapa faktor ekonomi yang berpengaruh adalah:

a. Sumber Daya Alam

Sumber Daya Alam menjadi faktor utama yang mempengaruhi terhadap pembangunan ekonomi. kekayaan alam suatu negara meliputi luas lahan dan kesuburan, kondisi iklim dan cuaca, kuantitas Jenis hasil hutan dan kandungan mineralnya. Ketersediaan sumber Sumber daya alam yang melimpah memudahkan dunia usaha Mengembangkan perekonomian suatu negara khususnya pada periode ini Awal pertumbuhan ekonomi. negara yang kekurangan sumber daya Kekuatan alam tidak dapat dibangun dengan cepat.

b. Sumber Daya Manusia.

Sumber Daya Manusia merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian SDM meliputi kualitas dan kuantitas dalam pertumbuhan ekonomi suatu Negara.

c. Modal

Modal adalah persediaan fisik faktor-faktor produksi yang dapat di produksi kembali. Pembentukan atau akumulasi modal adalah penanaman modal dalam bentuk barang modal dengan tujuan Meningkatkan stok modal, output nasional dan pendapatan negara itu. Jadi pembentukan modal adalah salah satu kuncinya dalam mencapai pertumbuhan ekonomi. Pembentukan modal bisa Meningkatkan output nasional dengan berbagai cara. Investasi barang modal tidak hanya meningkatkan output tetapi juga membawa kemajuan teknologi.

2.1.2.3 Pengukuran Pertumbuhan Ekonomi

Pengukuran Pertumbuhan Ekonomi yang paling utama dalam ilmu ekonomi adalah dengan menggunakan ukuran Laju Pertumbuhan Ekonomi.

Perhitungan Laju Pertumbuhan Ekonomi didasarkan pada perubahan Produk Domestik Bruto (PDB) dari satu periode ke periode berikutnya. Dimana PDRB merupakan ukuran nilai tambah dari semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah (Ariyani et al., 2018). PDRB berdasarkan pengertian BPS (Badan Pusat Statistik) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. PDRB dihitung dengan dua cara harga, yaitu harga saat ini dan harga tetap. PDRB berdasarkan harga saat ini adalah nilai tambah dari barang dan jasa yang diukur dengan harga yang berlaku pada tahun yang dimaksud, sedangkan PDRB berdasarkan harga tetap adalah nilai tambah dari barang dan jasa yang diukur dengan harga pada tahun tertentu yang dijadikan tahun acuan.

Menurut Sukirno (2010:331) Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan diperoleh dengan cara:

$$LPE = \frac{(PDRB_n - PDRB_{n-1})}{PDRB_{n-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

LPE = Laju Pertumbuhan Ekonomi

$PDRB_n$ = Tahun yang dihitung

$PDRB_{n-1}$ = Tahun Sebelumnya

Laju Pertumbuhan Ekonomi menggambarkan seberapa cepat nilai produksi barang dan jasa di suatu wilayah meningkat dalam periode tertentu. Dimana Rasio PDRB ini dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan, produktivitas,

dan kemajuan suatu negara. Semakin tinggi Rasio PDRB, semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

2.1.3 Belanja Modal

2.1.3.1 Pengertian Belanja Modal

Salah satu fungsi pengeluaran pemerintah adalah untuk melaksanakan kebijakan pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengeluaran Pemerintah adalah cerminan dari kebijakan pemerintah yang berlaku saat ini (Azwar et al., 2016). Pengeluaran pemerintah dapat dibagi menjadi beberapa jenis, salah satunya adalah belanja modal.

Menurut Undang Undang Nomor 71 Tahun 2010 Belanja modal adalah alokasi anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat ekonomi selama lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.

Hal ini selaras dengan pendapat Setiadi & Bessy (2023) yang menyebutkan bahwa Belanja modal adalah pengeluaran pemerintah pusat untuk memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lain yang berguna untuk aktivitas sehari-hari atau pembangunan Masyarakat. Caranya adalah dengan melakukan pendekatan pengeluaran seperti memberi hibah, pinjaman, atau donasi tertentu untuk membayar pengeluaran.

Belanja Modal adalah pengeluaran pemerintah pusat untuk pembuatan modal yang digunakan untuk berbagai keperluan seperti modal tanah, mesin, gedung, dan bangunan dan umur manfaatnya dalam satu periode akuntansi

(Oktavia, 2021). Pemerintah memiliki cara lain untuk menambah aset tetap tanpa harus menanti dana transfer dari Pemerintah Pusat/Provinsi yaitu dengan berinvestasi agar pendapatan yang didapat oleh daerah tersebut naik secara finansial. Aset-aset itu antara lain tanah, bangunan, jalan, mesin, peralatan, irigasi, dan lain-lain. Pengeluaran modal dapat memperkuat aset dan keamanan finansial Perusahaan sehingga dapat menaikkan biaya rutin untuk merawat aset dan tidak ditujukan untuk dijual, tetapi untuk digunakan dalam operasi sehari-hari. (Ningsih & Kara, 2023)

Berdasarkan beberapa pendapat diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset yang memberikan nilai manfaat lebih dari dua belas bulan atau satu periode akuntansi untuk digunakan dalam pemerintahan.

2.1.3.2 Jenis Jenis Belanja Modal

Jenis-jenis belanja modal beradaskan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 114/PMK.02/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2015 tentang Klasifikasi Anggaran:

1. Belanja Tanah

Seluruh pengeluaran untuk pengadaan/pembelian/pembebasan/ penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/dipakai.

2. Belanja modal peralatan dan mesin

Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

3. Belanja modal gedung dan bangunan

Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak (kontraktual).

4. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan

Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas minimal nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan

5. Belanja modal lainnya

Pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jaringan (Jalan, Irigasi dan lain-lain). Termasuk dalam belanja modal ini: kontrak sewa beli (leasehold), pengadaan/pembelian

barang-barang kesenian (art pieces), barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum, serta hewan ternak, buku-buku dan jurnal ilmiah sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat.

2.1.4 Kemandirian Keuangan Daerah

2.1.4.1 Pengertian Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan peraturan UU No.23 Tahun 2014, Kemandirian Keuangan Daerah berarti pemerintah daerah mampu melakukan pertanggungjawaban dan pembiayaan keuangan sendiri, melakukan sendiri dalam berdasarkan prinsip desentralisasi.

Menurut Romadhoni & Diana (2020) Kemandirian Keuangan Daerah merupakan potensi pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dana kegiatan pemerintahan, Pembangunan, dan pelayanan kepada Masyarakat yang berkontribusi melalui pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Kemandirian Keuangan daerah adalah proporsi sumber dana yang diperoleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat dan propinsi dibandingkan dengan sumber dana lainnya dalam membiayai kegiatan daerah (Eka Pradana Mahardika & Fauzan, 2022). Tujuan dari Kemandirian Keuangan Daerah adalah untuk mengukur seberapa baik pemerintah daerah dapat melaksanakan kewajibannya dan seberapa besar pemerintah daerah bergantung pada sumber daya keuangan yang bukan berasal dari daerah itu sendiri.

Berdasarkan Pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa Kemandirian Keuangan daerah merupakan potensi pemerintah daerah untuk membiayai dan

mempertanggungjawabkan keuangan daerahnya secara mandiri, berdasarkan prinsip desentralisasi. Kemandirian keuangan daerah dapat ditentukan dari perbandingan antara pendapatan asli daerah dengan pendapatan daerah sumber lain, seperti bantuan atau pinjaman dari pemerintah pusat.

Semakin tinggi kemandirian keuangan daerah, maka ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah dan provinsi semakin rendah. Kemandirian Keuangan Daerah merupakan salah satu tujuan dari otonomi daerah. Diadakannya otonomi daerah diharapkan suatu daerah dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing.

2.1.4.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah

Tangkilisan (2007) menyebutkan ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kemandirian keuangan daerah, yaitu:

1. Potensi Ekonomi Daerah, Produk Domestik Bruto (PDRB) adalah tolak ukur yang digunakan sebagai indikator potensi ekonomi daerah.
2. Kemampuan Dinas Pendapatan Daerah, dapat diartikan Kemandirian Keuangan daerah ditingkatkan secara terencana dengan memperbaiki kemampuan atau kinerja instansi atau Lembaga yang inovatif dan mengoptimalkan Dispenda (Dinas Pendapatan Daerah) untuk memperbesar penerimaan daerah.

2.1.4.3 Pengukuran Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian berfungsi sebagai alat pengukur untuk menilai sejauh mana kapabilitas pemerintah daerah dalam menjaga dan meningkatkan pencapaian keberhasilan yang telah diperoleh dalam satu periode, secara mandiri

dan tidak tergantung pada dukungan dari pemerintah pusat. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya (Tanudy & Parera, 2023).

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat diukur dengan data PAD dan Penerimaan dana transfer sebagai berikut Halim (2014).

$$\text{Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{PAD}{\text{Transfer Pusat} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Rumus ini menggambarkan hubungan antara kemandirian keuangan daerah dan ketergantungan pada dana dari luar daerah (pemerintah pusat, provinsi, dan lain-lain). Jika kemandirian keuangan daerah tinggi, berarti daerah tidak terlalu bergantung pada dana dari luar. Namun, jika kemandirian keuangan daerah rendah, berarti daerah sangat bergantung pada dana dari luar.

2.1.4.4 Pola Hubungan Kemandirian Daerah

Secara konseptual, pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah harus dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintah dan Pembangunan, walaupun pengukuran kemampuan keuangan daerah ini akan menimbulkan perbedaan.

Tabel 2.1
POLA HUBUNGAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	>25-50	Konsultatif
Sedang	>50-75	Partisipatif
Tinggi	>75-100	Delegatif

Sumber: Halim (2007)

Halim (2007:169) Salah satu landasan dalam kebijakan otonomi daerah adalah penerapan Undang-Undang dengan dana seimbang antara pemerintah pusat dan daerah seperti:

1. Pola Hubungan Instruktif

Pola hubungan yang menunjukkan bahwa pemerintah pusat memiliki peran yang lebih besar daripada pemerintah daerah dalam hal keuangan (pemerintah daerah tidak memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan daerah secara mandiri).

2. Pola Hubungan Konsultatif

Pola hubungan yang menunjukkan bahwa pemerintah pusat mulai memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah yang sudah sedikit bisa mengurus keuangan daerahnya, sehingga pemerintah pusat lebih sering memberi saran.

3. Pola Hubungan Partisipatif

Pola hubungan Dimana pemerintah mulai mengubah perannya dari hanya memberi nasihan menjadi ikut berpartisipasi karena daerah sudah hamper bisa mandiri dalam bidang ekonomi

4. Pola Hubungan Delegatif

Pola hubungan Dimana pemerintah pusat tidak ikut campur sama sekali karena daerah sudah memiliki kemampuan dan kemandirian menjalankan otonomi daerah

2.1.5 Kajian Empiris

Penelitian ini dilakukan dengan merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang bersangkutan, antara lain:

1. Tri Utari Handayanti dan Erinosa (2020) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating. Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah secara positif memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi tidak dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan.
2. Siska Yulia Defitri (2020) dengan judul “Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanja Modal berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Belanja Pegawai tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah
3. Mira Sarumaha dan Annisa (2023) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah”. Hasil Penelitian menunjukkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.
4. Nina Andriana (2020) dengan judul “Pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Daerah”. Hasil penelitian menunjukkan Dana Alokasi Umum tidak signifikan berpengaruh terhadap kemandirian daerah. Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Daerah.

Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kemandirian Daerah. Belanja modal mempunyai koefisien positif namun tidak signifikan berpengaruh terhadap kemandirian daerah. Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Belanja Modal secara Simultan berpengaruh terhadap Kemandirian Daerah.

5. Eny Wahyuni dan Lilis Ardini (2018) dengan judul “Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah” Hasil Penelitian menunjukkan Kinerja Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Belanja modal tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian euangan daerah. Belanja Pegawai berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
6. Wulan Riyadi (2022) dengan judul “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat” Hasil penelitian menunjukkan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
7. Eka Pradana Mahardika dan Fauzan (2022) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019)”. Hasil penelitian menunjukkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara positif

pada tingkat kemandirian keuangan daerah. Dana alokasi umum berhubungan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Belanja modal tidak memiliki hubungan dari tingkat kemandirian keuangan daerah

8. Krest D Tolosang (2018) dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Keuang Daerah Kota Tomohon”. Hasil Penelitian menunjukkan Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara bersama-sama pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Tomohon.
9. Renni Nur’ainy, Desfitriana dan Rooswhan Budi Utomo (2013) dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Kota di Jawa Barat)”. Hasil penelitian menunjukkan Secara Parsial Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara simultan Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
10. Praisy Gratia Sulangi, Choirul Anwar dan I Gusti Ketur Agung Uluput (2022) dengan judul “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pertumbuhan Ekonomi, dan Luas Wilayah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi di Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan Dana Alokasi Umum berpengaruh Terhadap kemandirian Keuangan Daerah. Pertumbuhan ekonomi dan Luas Wilayah tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

11. Nadya Putri Saraswati dan Nashirotn Nisa Nurharjanti (2021) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah”. Hasil penelitian menunjukkan Secara simultan Pajak Daerah, retribusi daerah, belanja modal dan dana perimbangan memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara parsial retribusi daerah, belanja modal dan dana perimbangan tidak memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.
12. Budi Saputa, Yohanes Vyn Amzar dan Purwaka H.P. (2015) dengan judul “Analisis Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi”. Hasil penelitian ini menunjukkan Kemandirian keungan daerah berpengaruh positif namun tidak signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi.
13. Rapma Wati Siringo (2022) dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Utara”. Hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan ekonomi dan dana alokasi umum secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di provinsi sumatera utara. Pendapatan Asli Daerah secara parsial memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Dana bagi Hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Secara simultan seluruh variabel independen

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

14. Resti Puspita Laoli, Febri Valentinus Situmorang dan Benny Rojeston Marnaek (2020) dengan judul "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara)". Hasil penelitian menunjukkan Pertumbuhan ekonomi secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan. Pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan. Secara simultan variabel pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan.
15. Muhammad Rivandi dan Yeyen Anggraini (2022) dengan judul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2016-2021". Hasil Penelitian menunjukkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Belanja modal berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.
16. Muhammad Kadafi, Oemar Dhanny dan Dewi Wahyuni (2019) dengan judul "Pengaruh Belanja Modal dan Penyertaan Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Seluruh Kab/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2013-2017". Hasil penelitian menunjukkan Secara parsial belanja modal tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Secara parsial penyertaan modal pemerintah berpengaruh

positif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Belanja modal dan penyertaan modal pemerintah secara simultan (Uji F) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.

17. Ni Putu Yuliana Ria Sawitri, Luh Putu Virra Indah Perdanawati, Ni Nyoman Sudyani dan Made Setini (2019) dengan judul “*Local Revenue and Financial Independence on Economic Growth Through Capital Expenditure*”. Hasil Penelitian menunjukkan *The Regional Revenue directly has a positive effect on regional economic growth while financial independence does not directly affect regional economic growth, and capital expenditure cannot mediate local income growth and financial independence on economic growth.*
18. R. Neneng Rina Andriani dan Nisa Noor Wahid (2018) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2006-2015)”. Hasil penelitian menunjukkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
19. Ony Widilestariningtyas (2019) dengan judul “*Relationship Between Regional Economic Growth and Regional Original Revenue to Regional Financial Independence*”. Hasil penelitian menunjukkan *research proves that partially there is a relationship between economic growth in regional own-source*

revenue, economic growth in regional financial independence, and regional ownsource income to regional financial independence. The benefits of research for local governments in West Java are to increase the potential of jurisdiction, it is necessary to increase regional income so that regional economic growth increases and dependence on the central government is low so that regional financial independence in West Java can be achieved.

20. Andi Syahrul Asfar, Muh.Akob, Gunawan Bata Ilyas, Muh.Abduh. Anwar, Yusriadi yusriadi, M.Chairul Basrun Umanailo, dan Suprayitno (2021) dengan judul *“The Effect of Regional Original Income and Capital Expenditure Management against Economic Growth of Mamuju Central Regency through Performance Effectiveness Regional Finance”*. Hasil penelitian menunjukkan *The results showed no direct effect of PAD and Capital Expenditure Management on the Effectiveness of Regional Financial Performance. However, PAD on Capital Expenditure Management had a tremendous impact on economic growth, in contrast to the effectiveness of Regional Financial Performance which had no direct or indirect effect on economic growth. Likewise, PAD and Capital Expenditure Management on Economic Growth through the Effectiveness of Regional Financial Performance also do not indirectly impact.*

Tabel 2.2
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Penulis

No	Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tri Utari Handayani dan Erinis 2020. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah • Belanja Modal • Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah • Pertumbuhan Ekonomi (Variabel Moderating) 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda 	Pendapatan Asli Daerah secara positif memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi tidak dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan.	Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA) Vol. 2, No. 1, Seri C, Februari 2020, Hal 2348-2361 ISSN: 2656-3649 (Online). http://jea.pj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/19 .
2	Siska Yulia Defitri 2020. Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat)	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Modal • Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Pegawai • Menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda 	Belanja Modal berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Belanja Pegawai tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.	Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi Vol. 19, No. 02, December 2020. http://journal.stieputr.abangsa.ac.id/index.php/fokbis/index . ISSN: 2623-2480/P- ISSN:1693-5209.

No	Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Mira Sarumaha, Annisa 2023. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah • Belanja Modal • Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah • Menggunakan Analisis Regresi Data Panel 		Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto Volume 19 No. 3, Desember 2016 ISSN 1979 - 6471
4	Nina Andriana 2020. Pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Modal • Kemandirian Daerah • Menggunakan Analisis Regresi Data Panel 	<ul style="list-style-type: none"> • Dana Perimbangan (DAU, DAK, DBH) 	Dana Alokasi Umum tidak signifikan berpengaruh terhadap kemandirian daerah. Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Daerah. Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kemandirian Daerah. Belanja modal mempunyai koefisien positif namun tidak signifikan berpengaruh terhadap kemandirian daerah. Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Belanja Modal secara Simultan berpengaruh terhadap Kemandirian Daerah.	Jurnal Pajak dan Keuangan Negara V91. 2, No.1, (2020), Hal. 105-113
5	Eny Wahyuni dan Lilis Ardini 2018. Pengaruh Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> • Kinerja pendapatan Asli Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Pegawai • Menggunakan Analisis 	Kinerja Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap tingkat	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi.

No	Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Modal • Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Regresi Linear Berganda 	kemandirian keuangan daerah. Belanja modal tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Belanja Pegawai berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. Vo.7, No 6 e-ISSN: 2460-0585.
6	Wulan Riyadi 2022. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Modal • Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Dana Alokasi Umum • Dana Alokasi Khusus • Menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda 	Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.	Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi Vo.3, No. 1, Periode Februari-Agustus 2022. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka. ISSN: 2721-060X.
7	Eka Pradana Mahardika dan Fauzan 2022. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah • Belanja Modal • Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Dana Alokasi Umum • Menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda 	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara positif pada tingkat kemandirian keuangan daerah. Dana alokasi umum berhubungan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Belanja modal tidak memiliki hubungan	Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 11, No. 1, Juli 2022. P-ISSN: 2503-4413 E-ISSN: 2654-5837,

No	Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019)			dari tingkat kemandirian keuangan daerah.	Hal 407-416.
8	Krest D Tolosang 2018. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Keuang Daerah Kota Tomohon	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi • Pendapatan Asli Daerah • Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan analisis Regresi Linear Berganda 	Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara bersama-sama pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Tomohon.	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol, 18, No.03, Tahun 2018. Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi
9	Renni Nur'ainy, Desfitriana dan Rooswhan Budi Utomo 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi • Pendapatan Assli Daerah • Tingkat Kemandirian Keuagan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan analisis Regresi Linear Berganda 	Secara Parsial Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara simultan Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Teknik Sipil), Vol. 5. Oktober 2013, Bandung 8-9 Oktober 2013.

No	Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kota di Jawa Barat)				ISSN: 1858- 2559.
10	Praisya Gratia Sulangi, Choirul Anwar dan I Gusti Ketur Agung Uluput 2022. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pertumbuhan Ekonomi, dan Luas Wilayah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi • Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Dana Alokasi Umum • Menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda 	Dana Alokasi Umum berpengaruh Terhadap kemandirian Keuangan Daerah. Pertumbuhan ekonomi dan Luas Wilayah tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.	Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing, Vol. 3, No. 2, Agustus 2022, hal 328-338. http://pub.unj.ac.id/journal/index.php/japa . Universitas Negeri Jakarta. e-ISSN: 2722-9823.
11	Nadya Putri Saraswati dan Nashirotn Nisa Nurharjanti 2021. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak Daerah (Pendapatan Asli Daerah) • Retribusi Daerah (Pendapatan Asli Daerah) • Belanja Modal • Kemandirian Keuangan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Dana Perimbangan • Menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda 	Secara simultan Pajak Daerah, retribusi daerah, belanja modal dan dana perimbangan memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara parsial retribusi daerah, belanja modal dan dana perimbangan tidak memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.	Prosiding Biema Business Management, Economic and Accounting National Seminar, Vol. 2, 2021, Hal. 51-64. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
12	Budi Saputa, Yohanes Vyn Amzar dan	<ul style="list-style-type: none"> • Kemandirian Keuangan Daerah 		Kemandirian keungan daerah berpengaruh positif namun tidak	Eko-Regional, Vol. 10,

No	Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Purwaka H.P. 2015. Analisis Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi	(variabel independen) • Pertumbuhan Ekonomi (variabel dependen) • Menggunakan Analisis Regresi Dana Panel		signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi	No.2, September 2015. Prodi IE FEB Universitas Jambi, Staf Pengajar Prodi IE FEB Universitas Jambi.
13	Rapma Wati Siringo 2022. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Utara	• Pertumbuhan Ekonomi • Pendapatan Asli Daerah • Kemandirian Keuangan Daerah	• Dana Alokasi Umum • Dana Bagi Hasil • Menggunakan Analisis Regresi Berganda	Pertumbuhan ekonomi dan dana alokasi umum secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di provinsi sumatera utara. Pendapatan Asli Daerah secara parsial memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Dana bagi Hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Secara simultan seluruh variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.	

No	Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14	Resti Puspita Laoli, Febri Valentinus Situmorang dan Benny Rojeston Marnaek 2020. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasu Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara)	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi • Pendapatan Asli Daerah • Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda 	Pertumbuhan ekonomi secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan. Pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan. Secara simultan variabel pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan	Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi) Vol. 4, No. 3, 2020. Universitas Prima Indonesia Medan.
15	Muhammad Rivandi dan Yeyen Anggraini 2022. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2016-2021	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah • Belanja Modal • Kemandirian Keuangan Daerah • Menggunakan Regresi Data Panel 		Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Belanja modal berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.	Jurnal Inovasi Penelitian Vol. 3, No 6. November 2022. Prodi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi KBP
16	Muhammad Kadafi, Oemar Dhanny dan Dewi Wahyuni 2019.	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Modal • Tingkat Kemandirian Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyertaan Modal • Menggunakan Analisis Regresi 	Secara parsial belanja modal tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat	Jurnal Eksis Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri

No	Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pengaruh Belanja Modal dan Penyertaan Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Seluruh Kab/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2013-2017		Linear Berganda	kemandirian keuangan daerah. Secara parsial penyertaan modal pemerintah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Belanja modal dan penyertaan modal pemerintah secara simultan (Uji F) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.	Samarinda Vo. 15, No. 1 April 2019. ISSN: 0216-6437 ISSN 2722-9327 (Online)
17	Ni Putu Yuliana Ria Sawitri, Luh Putu Virra Indah Perdanawati, Ni Nyoman Sudiyani dan Made Setini 2019. <i>Local Revenue and Financial Independence on Economic Growth Through Capital Expenditure</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Local Revenue</i> • <i>Financial Independence (Independent Variabel)</i> • <i>Economic Growth</i> • <i>Capital Expenditure</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>using qualitative descriptive methods</i> 	<i>The Regional Revenue directly has a positive effect on regional economic growth while financial independence does not directly affect regional economic growth, and capital expenditure cannot mediate local income growth and financial independence on economic growth.</i>	<i>Jurnal Ekonomi/Volume XXV, No. 02 Juli 2020: 320-336 DOI: http://dx.doi.org/10.24912/je.v25i2.683</i>
18	R. Neneng Rina Andriani dan Nisa Noor Wahid 2018. Pengaruh Pendapatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah • Kemandirian Keuangan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>using correlation analysis</i> 	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.	Jurnal Akuntansi Vol. 13, No. 1, Januari

No	Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2006-2015)			Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.	2018, Hal 30-39. Universitas Siliwangi, Indonesia. http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jak . ISSN: 1907-9958
19	Ony Widilestarinintyas 2019. <i>Relationship Between Regional Economic Growth and Original Revenue to Regional Financial Independence</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Economic Growth</i> • <i>Original Revenue</i> • <i>Regional Financial Independence</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Capital Expenditure</i> 	<i>The result research proves that partially there is a relationship between economic growth in regional own-source revenue, economic growth in regional financial independence, and regional ownsource income to regional financial independence. The benefits of research for local governments in West Java are to increase the potential of jurisdiction, it is necessary to increase regional income so that regional economic growth increases and dependence on the central government is low so that regional financial independence in West Java can be achieved.</i>	<i>Advances in Economics, Business and Management Research, volume 112 International Conference on Business, Economic, Social Science, and Humanities – Economics, Business and Management Track (ICOBEST-EBM 2019)</i>

No	Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20	Andi Syahrul Asfar, Muh.Akob, Gunawan Bata Ilyas, Muh.Abduh. Anwar, Yusriadi yusriadi, M.Chairul Basrun Umanailo, dan Suprayitno 2021. <i>The Effect of Regional Original Income and Capital Expenditure Management against Economic Growth of Mamuju Central Regency through Performance Effectiveness Regional Finance</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Original Revenue</i> • <i>Economic growth</i> • <i>Capital Expenditure</i> • <i>Using Analysis Panel Data</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Effectiveness Regional Finance</i> 	<i>The results showed no direct effect of PAD and Capital Expenditure Management on the Effectiveness of Regional Financial Performance. However, PAD on Capital Expenditure Management had a tremendous impact on economic growth, in contrast to the effectiveness of Regional Financial Performance which had no direct or indirect effect on economic growth. Likewise, PAD and Capital Expenditure Management on Economic Growth through the Effectiveness of Regional Financial Performance also do not indirectly impact.</i>	<i>Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Sao Paulo, Brazil, April 5 - 8, 2021</i>
Febiola Rachmawati (203403161) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Sensus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022)					

2.2 Kerangka Pemikiran

Otonomi daerah adalah hak daerah otonom untuk mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat dan hukum yang berlaku.

Penerapan otonomi daerah dimaksudkan agar pemerintah daerah mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggara pemerintah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dalam hal lain adalah untuk mewujudkan kemandirian keuangan daerah.

Dalam otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan kewenangan fiskal kepada pemerintah daerah, sehingga daerah memiliki hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Dalam penelitian ini, salah satu Provinsi yang diberikan kewenangan adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Dengan wewenang dari pemerintah pusat tersebut diharapkan Provinsi Jawa Barat dapat menggali potensi yang ada pada setiap Kabupaten/Kota. Hal ini termasuk dalam pelaksanaan otonomi daerah, di mana daerah diharapkan dapat mengelola potensi yang ada untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Kemandirian keuangan daerah merujuk pada kapasitas pemerintah daerah untuk memenuhi dana yang dibutuhkan untuk kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Farouq, 2022).

Kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan daerah untuk mengurus keuangan daerah tanpa harus mengandalkan dana dari pihak luar. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah untuk mendanai pemerintahannya sendiri dan mengembangkan daerah dengan menggunakan pendapatan asli daerah (PAD). Menurut Undang-Undang No.33

tahun 2004 pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lain yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asa desentralisasi. Adapun Menurut Iryanie (2018) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari berbagai sumber di dalam batas wilayahnya sendiri, yang dikumpulkan sesuai dengan ketentuan peraturan daerah yang sesuai dengan hukum yang berlaku. PAD ini bertujuan untuk memberikan kewenangan dan kemandirian kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sehingga mencerminkan potensi dan kemampuan daerah dalam mendanai kebutuhan dan Pembangunan daerah.

Semakin PAD meningkat, maka pemerintah daerah dapat lebih leluasa dalam mengalokasikan anggaran dan membiayai program-program lokal tanpa bergantung pada dana dari pemerintah pusat. Dalam penelitian ini pendapatan asli daerah menggunakan indikator dengan penambahan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Kemandirian Keuangan Daerah yang baik tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Uraian diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Utari Handayani (2020) menunjukkan hasil Pendapatan Asli Daerah secara positif memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, Sarumaha et al. (2023) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kemandirian keuangan daerah, dan penelitian yang dilakukan Nur'ainy et

al. (2013) mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Selain Pendapatan Asli Daerah, faktor lain dalam mewujudkan kemandirian keuangan daerah adalah Pertumbuhan Ekonomi. Menurut Kementerian Keuangan, mendefinisikan Pertumbuhan Ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah setiap periodenya maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Namun, realitanya, pertumbuhan ekonomi tidak berdampingan dengan tingkat kemandirian keuangan daerah.

Dalam hal ini terdapat korelasi antara Pertumbuhan Ekonomi dan Kemandirian Keuangan Daerah yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat setempat yang juga tinggi sehingga kemandirian keuangan daerah juga akan tercapai. Dalam penelitian ini, pertumbuhan ekonomi diukur menggunakan Laju Pertumbuhan Ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi ini diperoleh dengan mengurangi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun sekarang dengan PDRB tahun sebelumnya, kemudian hasilnya dibagi dengan PDRB tahun sebelumnya dan dikalikan dengan seratus persen.

Hal tersebut selaras dengan Penelitian yang dilakukan oleh Tolosang (2018) mengemukakan pendapat bahwa Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, penelitian Prasetyo (2020)

mengatakan Pertumbuhan Ekonomi negatif tidak signifikan terhadap Kemandirian keuangan daerah, akan tetapi penelitian Hermawan & Solehudin (2023) mengatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Pengeluaran Pemerintah adalah cerminan dari kebijakan pemerintah yang berlaku saat ini (Azwar et al., 2016). Pengeluaran pemerintah dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu belanja pegawai, belanja operasi, belanja modal, dll. Dalam penelitian ini instrument Pengeluaran Pemerintah yang digunakan salah satunya adalah belanja modal.

Menurut Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010 Belanja modal adalah alokasi anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat ekonomi selama lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Selain itu, Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk membentuk modal yang dapat menambah jumlah aset tetap. Aset tetap adalah aset yang bermanfaat lebih dari satu periode akuntansi, dan belanja modal mencakup pengeluaran untuk biaya perawatan aset tetap yang bertujuan untuk memelihara atau meningkatkan umur manfaat serta kualitas dan kapasitas aset (Eka Suryani, 2018).

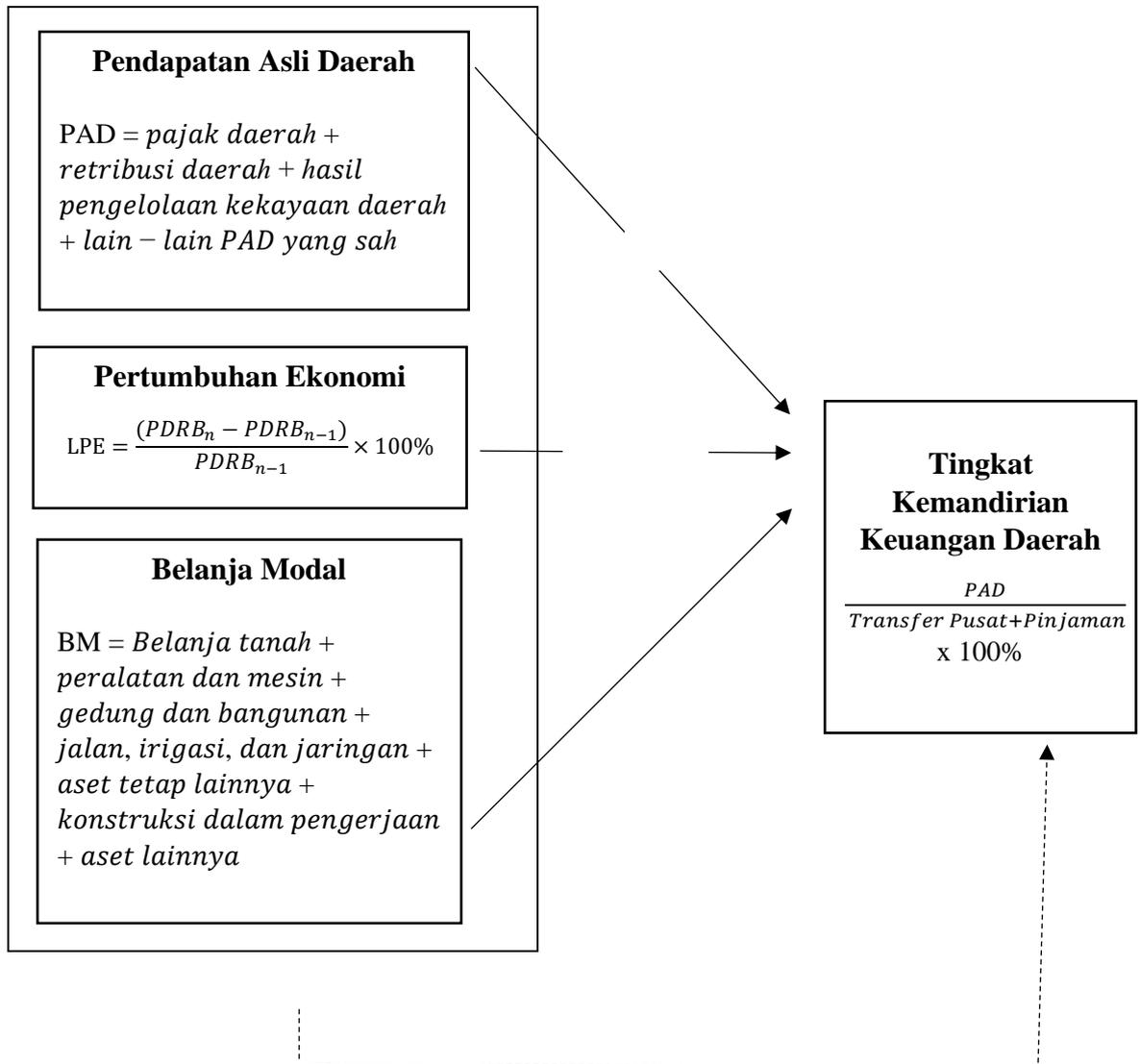
Daerah yang memiliki fasilitas dan infrastruktur yang cukup akan mempengaruhi tingkat produktivitas masyarakat dan mendanai investor untuk berinvestasi di daerah tersebut dan akan meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga kemandirian keuangan daerah akan bertambah (Amrozi, 2016). Dalam

penelitian ini variabel belanja modal menggunakan indikator penambahan belanja, tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan dan aset lainnya.

Selain itu, Sumber pendapatan daerah harus terus dapat ditingkatkan dalam pelaksanaan otonomi daerah karena akan diperlukan untuk mendanai kegiatan pemerintahan dalam bentuk belanja modal dan belanja operasi, banyaknya belanja modal yang dibiayai oleh keuangan daerah menunjukkan daerah tersebut dapat menjalankan pemerintahannya. Daerah yang memiliki infrastruktur yang baik di suatu wilayah akan meningkatkan produktivitas penduduknya dan menarik investor untuk menanamkan modal pada suatu daerah dan akan menambah Pendapatan Asli Daerah sehingga Kemandirian Keuangan Daerah akan meningkat.

Penelitian terdahulu yang sejalan dengan pengaruh belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah adalah penelitian Kadafi et al. (2019) yaitu belanja modal tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, Wahyuni & Ardini (2018) Belanja modal tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian dan penelitian Andriana (2020) mengemukakan bahwa Belanja modal mempunyai koefisien positif namun tidak signifikan berpengaruh terhadap kemandirian daerah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat digambarkan kerangka penelitian yang dianggap perlu dilakukan terkait pengujian. Adapun kerangka pemikiran dan indikator dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Keterangan:

- ▶ Secara Parsial
- ▶ Secara Simultan

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal berpengaruh secara simultan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
2. Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
3. Pertumbuhan Ekonomi secara parsial berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
4. Belanja Modal secara parsial berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;